



# RANCANGAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN TANDA PANGKAT PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



PEMILIHAN  
UMUM  
SERENTAK  
LEGISLATIF  
&  
PRESIDEN  
2019



oleh:

**Dr. BUDI UTOMO, S.IP., M.Si.**

**KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI - BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

17  
April 2019

**YOGYAKARTA, 11 APRIL 2019**



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id

# CURRICULUM VITAE



<b>Nama</b>	:	<b>Dr. BUDI UTOMO, S.IP., M.Si.</b>
TTL	:	Lampung Selatan, 8 Juni 1979
Jabatan	:	Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi
Instansi	:	Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta
Pendidikan Terakhir	:	Doktor Ilmu Politik (S-3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung  Department of Political Science Faculty of Arts and Social Sciences Dalhousie University Marion McCain Arts and Social Sciences Building Halifax, Nova Scotia, Canada
Riwayat Pekerjaan	:	1. Dosen FISIP Unpad, Bandung; 2. Dosen Non Organik SESKOAD, Bandung;
Kontak	:	E-mail: <a href="mailto:budiutomo79@gmail.com">budiutomo79@gmail.com</a> HP dan WA: 0812 2040 8866

MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI



# A. PENDAHULUAN



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



[www.rb.kemendagri.go.id](http://www.rb.kemendagri.go.id)



# PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEBAGAI KORBINWAS PEMDA

## REGULASI SAAT INI



## BINWAS UMUM

### KEMENDAGRI

1. Pembagian Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan Daerah;
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. Pelayanan Publik di Daerah;
7. Kerja Sama Daerah;
8. Kebijakan Daerah;
9. Kepala Daerah dan DPRD; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan PUU.

34 PROVINSI

## BINWAS TEKNIS

34 KEMENTERIAN DAN 31 LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

32 URUSAN PEMERINTAHAN



34 PROVINSI





# PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, **TANGGAL 31 OKTOBER 2007**

PAKAIAN  
DINAS PNS

Batik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, **TANGGAL 4 NOVEMBER 2009**

Jadwal  
Linmas  
Korpri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, **TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015**

Jadwal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, **TANGGAL 22 JANUARI 2016**

CAMAT DAN LURAH  
TERMASUK  
DIDALAMNYA





# PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH BERDASAR AMANAT PP 17 TAHUN 2018



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan  
Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan  
Pemerintah tentang Kecamatan;



- 25 -

BAB V  
PAKAIAN DINAS

Pasal 31

- (1) Pakaian dinas camat dan lurah terdiri atas:
  - a. pakaian dinas harian;
  - b. pakaian dinas upacara; dan
  - c. pakaian dinas lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2018,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 73

© Biro Ortala Setjen KDN, 2018

© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id



# PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH

PAKAIAN  
DINAS CAMAT  
DAN LURAH  
PP No. 17/2018  
Pasal 31

1

Pakaian dinas camat dan lurah terdiri atas:

- a. pakaian dinas harian;
- b. pakaian dinas upacara; dan
- c. pakaian dinas lapangan.

2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.





## B. TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN BAGI CAMAT DAN LURAH



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



[www.rb.kemendagri.go.id](http://www.rb.kemendagri.go.id)



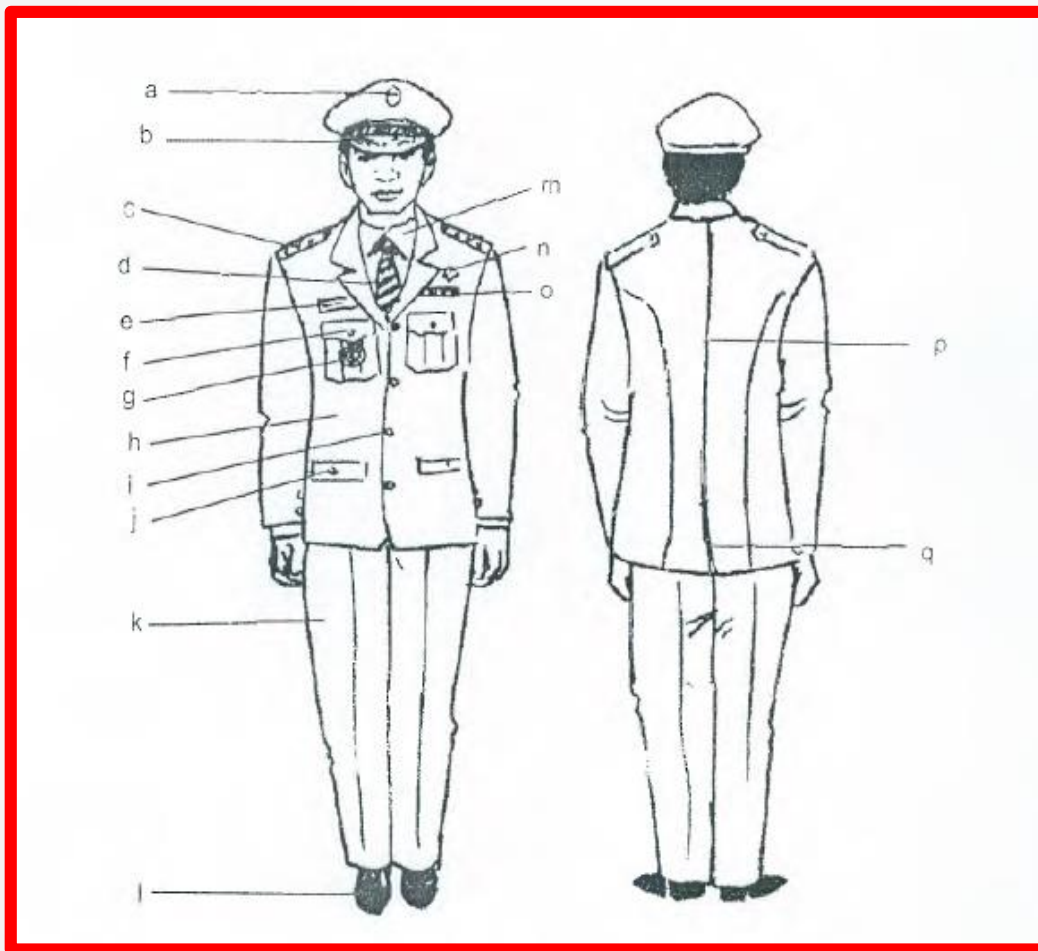


# PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH



PAKAIAN  
DINAS  
UPACARA

PRIA



## KETERANGAN

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah        | j. Saku Bawah Tertutup  |
| b. Topi Warna Hitam      | k. Celana Panjang Putih |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Sepatu Hitam         |
| d. Dasi                  | m. Kemeja Putih         |
| e. Papan Nama            | n. Lencana Korpri       |
| f. Saku Atas Tertutup    | o. Tanda Jasa           |
| g. Tanda Jabatan         | p. Belahan Jahitan      |
| h. Jas Warna Putih       | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Kancing Berwarna Emas |                         |



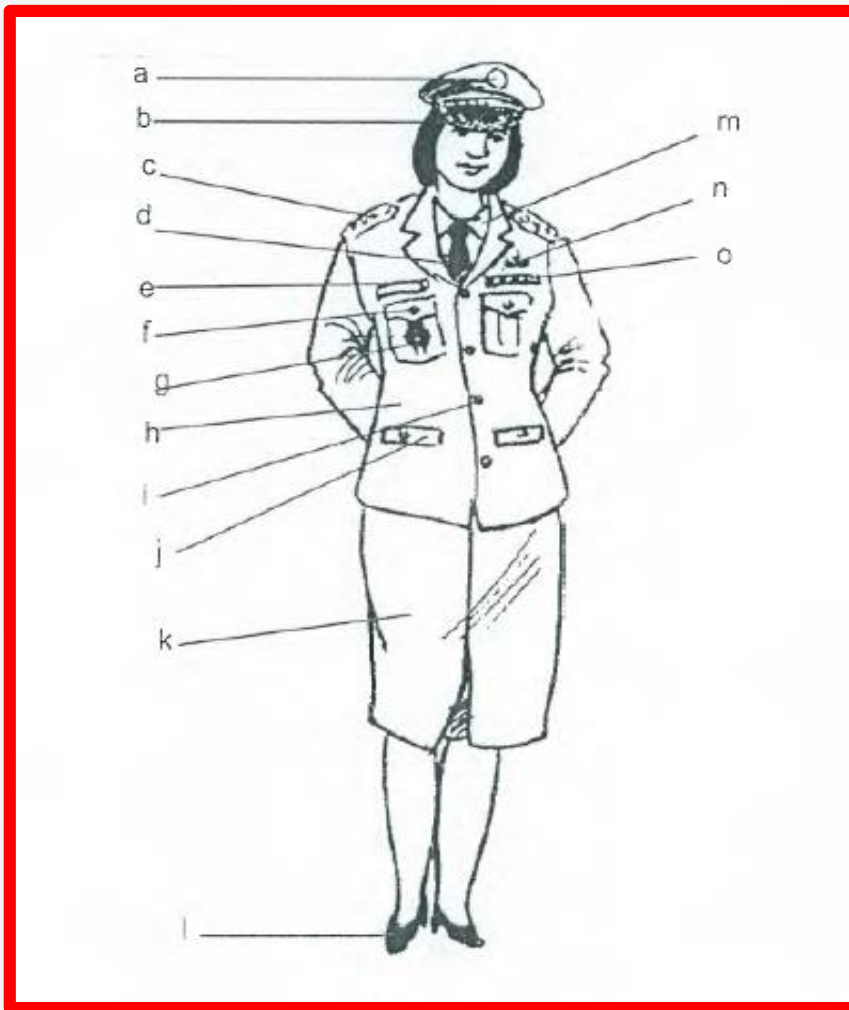


# PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH



PAKAIAN  
DINAS  
UPACARA

WANITA



## KETERANGAN

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah        | i. Kancing Berwarna Emas |
| b. Topi Warna Hitam      | j. Saku Bawah Tertutup   |
| c. Tanda Pangkat Upacara | k. Rok Putih             |
| d. Dasi                  | l. Sepatu Hitam          |
| e. Papan Nama            | m. Kemeja Putih          |
| f. Saku Atas Tertutup    | n. Lencana Korpri        |
| g. Tanda Jabatan         | o. Tanda Jasa            |
| h. Jas Warna Putih       |                          |





# TOPI PDU CAMAT DAN LURAH



## C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

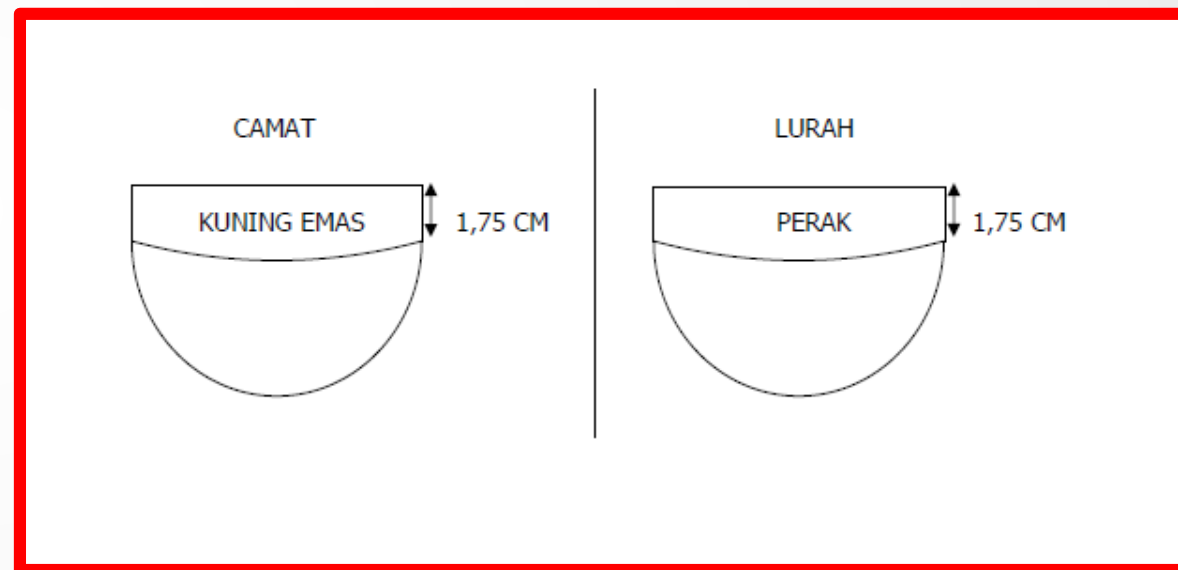
Akan diubah dengan Logo Garuda Emas dan Perak

## TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.





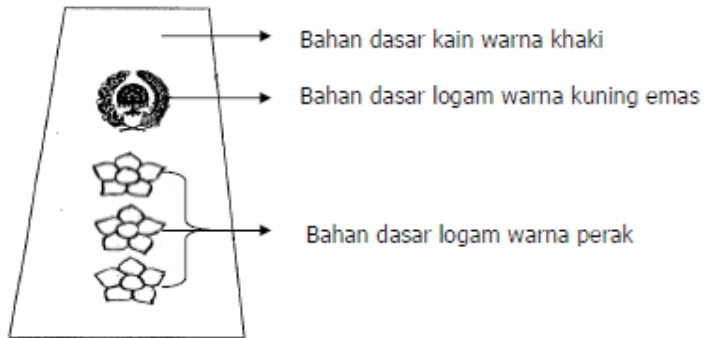
# TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH



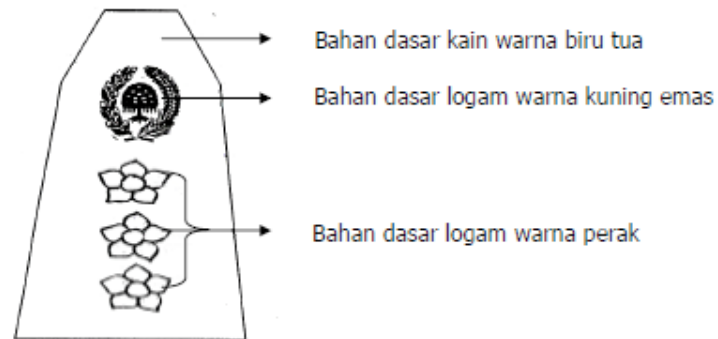
## D. TANDA PANGKAT.

### 1) CAMAT.

#### a. Harian.

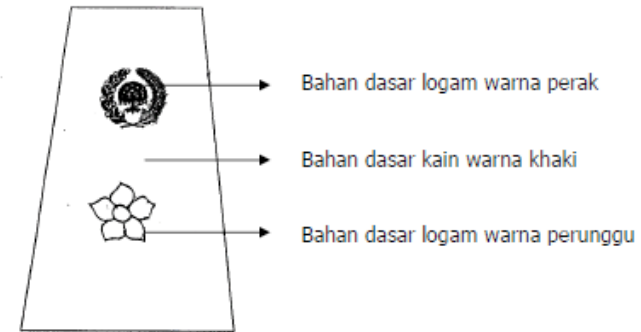


#### b. Upacara.

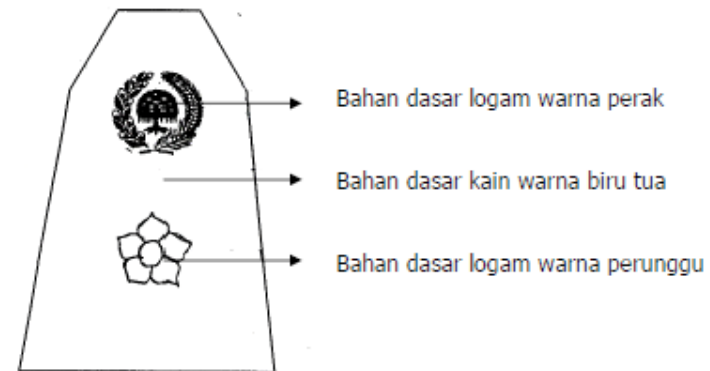


### 2) LURAH.

#### a. Harian.



#### b. Upacara.



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id

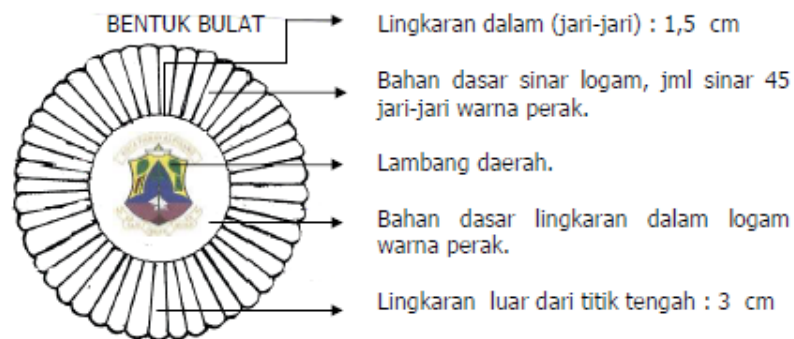


# TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

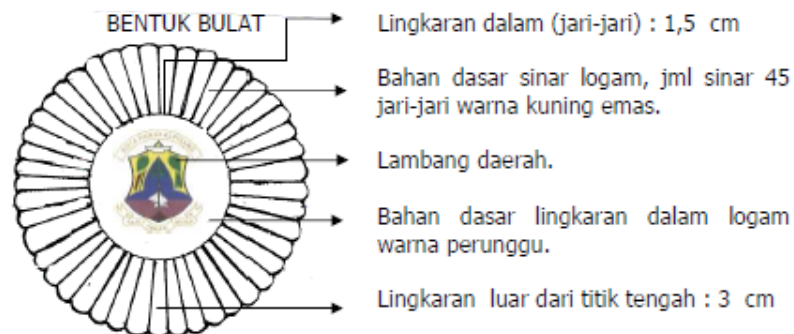


## E. TANDA JABATAN.

### 1) CAMAT.



### 2) LURAH.



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagriRB



KemendagriRB



@kemendagriRB



www.rb.kemendagri.go.id



# PDU CAMAT DAN LURAH



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id



C.

# TANDA PANGKAT PNS KEMENDAGRI DAN PEMDA SELAIN CAMAT, LURAH DAN POL PP



@kemendagriRB



KemendagriRB



@kemendagriRB




[www.rb.kemendagri.go.id](http://www.rb.kemendagri.go.id)





# TANDA PANGKAT TNI

PERWIRA
Perwira Tinggi
 Jenderal
 Letnan Jenderal
 Mayor Jenderal
 Brigadir Jenderal

Perwira Menengah
 Kolonel
 Letnan Kolonel
 Mayor

Perwira Pertama
 Kapten
 Letnan Satu
 Letnan Dua

BINTARA
Bintara Tinggi
 Pembantu Letnan Satu
 Pembantu Letnan Dua

 Sersan Mayor
 Sersan Kepala
 Sersan Satu
 Sersan Dua

TAMTAMA
 Kopral Kepala
 Kopral Satu
 Kopral Dua
 Prajurit Kepala
 Prajurit Satu
 Prajurit Dua



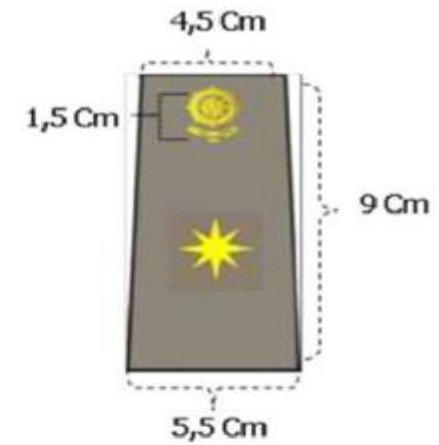
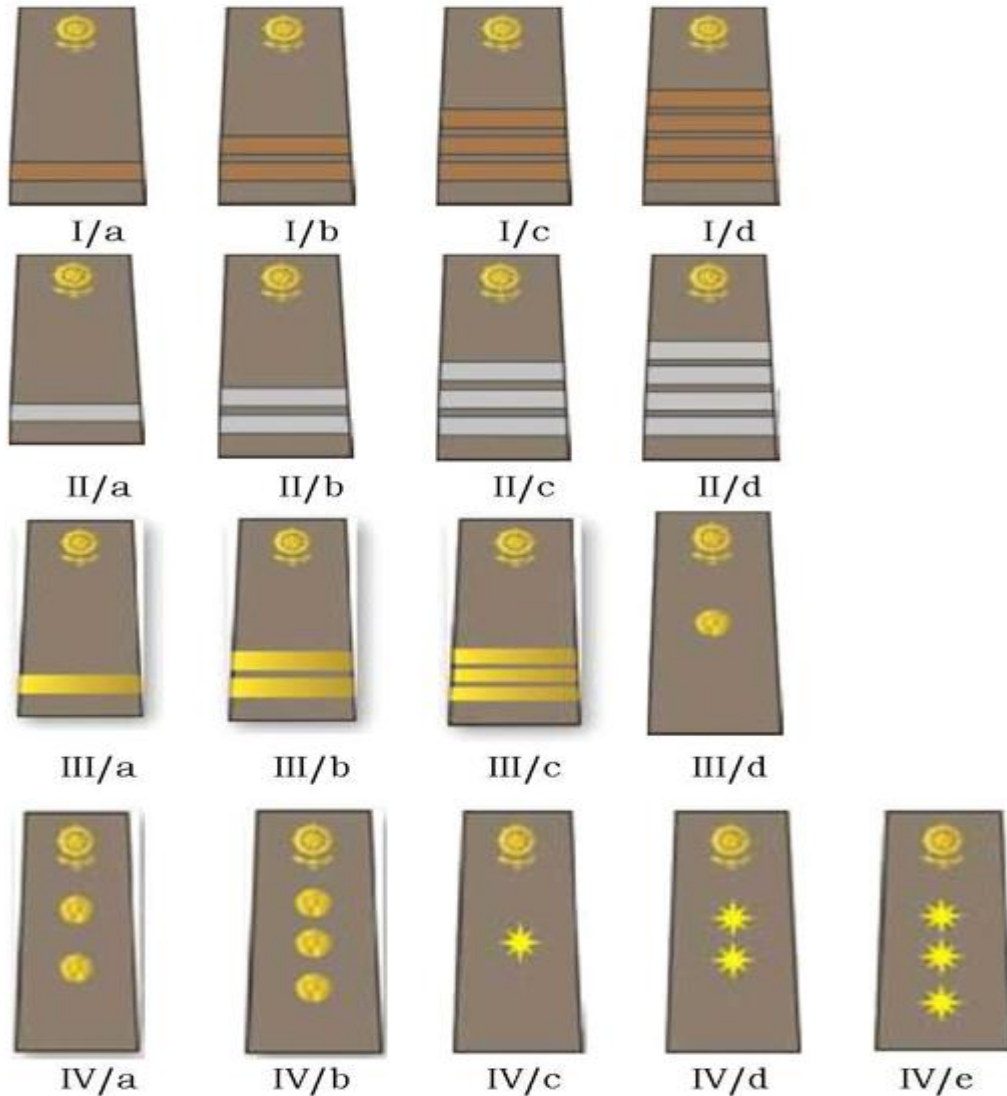


# TANDA PANGKAT POLRI

<p>JENJARAL POLRI</p>	<p>KOMANDANSIA MAJU POLRI</p>	<p>AJUN KOMANDANSIA POLRI</p>	<p>AJUN INSPEKTUR POLRI SATU</p>	<p>BRIGADIR POLRI TERTAMA</p>	<p>AJUN BRIGADIR POLRI</p>
<p>KOMANDANSIA JENDERAL POLRI</p>	<p>AJUN KOMANDANSIA BERTAMU POLRI</p>	<p>INSPEKTUR POLRI SATU</p>	<p>AJUN INSPEKTUR POLRI DUA</p>	<p>BRIGADIR POLRI</p>	<p>AJUN BRIGADIR POLRI SATU</p>
<p>INSPEKTUR JENDERAL POLRI</p>	<p>KOMANDANSIA POLRI</p>	<p>INSPEKTUR POLRI DUA</p>	<b>Bintara Tinggi</b>	<p>BRIGADIR POLRI SATU</p>	<p>AJUN BRIGADIR POLRI DUA</p>
<p>BRIGADIR JENDERAL POLRI</p>	<b>Perwira Menengah</b>	<b>Perwira Pertama</b>		<p>BRIGADIR POLRI DUA</p>	<p>BRIGADIR POLRI TERTAMA</p>
<b>Perwira Tinggi</b>				<b>Bintara</b>	<p>INSPEKTUR POLRI SATU</p>
					<p>INSPEKTUR POLRI DUA</p>
					<b>Tamtama</b>



# TANDA PANGKAT SATPOL PP



TANDA PANGKAT PADA PDU  
(Pangkat disesuaikan)

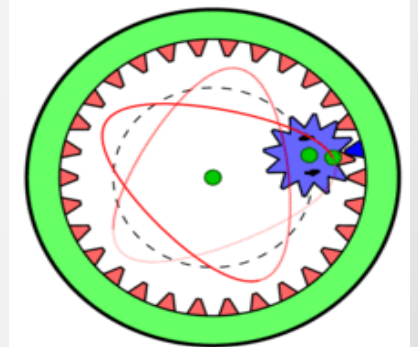
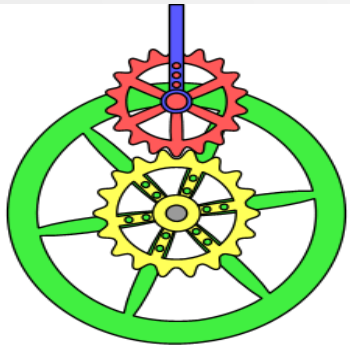


# FILOSOFI TANDA PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

KESERAGAMAN

DISIPLIN

TANDA PELAYAN  
MASYARAKAT



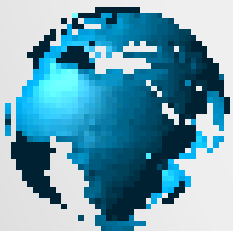


# PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA TNI DENGAN PANGKAT PNS



## Usulan Penyetaraan pangkat prajurit TNI dengan ASN (Surat Panglima TNI Nomor R/146/08/05/46/Spers)

NO	PANGKAT	PNS		ESELON	JABATAN	KET
		PANGKAT	GOL/ RUANG			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Letnan Jenderal</li> <li>Laksamana Madya</li> <li>Marsekal Madya</li> </ul>	Pembina Utama	IV/e	I.a	JPT Utama (Kepala LPNK)	usulan
		Pembina Utama Madya	IV/d	I.a	JPT Madya (Sesmen, Sekjen, Irjen, Rektor Unhan, Wagub Lemhannas)	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor Jenderal</li> <li>Laksamana Muda</li> <li>Marsekal Muda</li> </ul>	Pembina Utama Madya	IV/d	I.a I.b	JPT Madya	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brigadir Jenderal</li> <li>Laksamana Pertama</li> <li>Marsekal Pertama</li> </ul>	Pembina Utama Muda	IV/c	II.a II.b	JPT Pratama	
4	Kolonel	Pembina Tingkat I	IV/b	III.a III.b	Administrator	
5	Letnan Kolonel	Penata Tingkat I	III/d	IV.a IV.b	Pengawas	
6	Kapten – Mayor	Penata Tingkat I	III/d	V.a	Pelaksana	





# PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA TNI DENGAN PANGKAT PNS

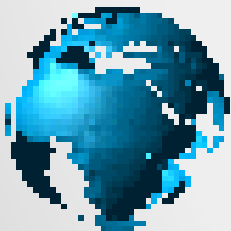


## Penyetaraan pangkat prajurit TNI dengan ASN

NO	PANGKAT	PNS		ESELON	JABATAN	KET
		PANGKAT	GOL/ RUANG			
7	Letnan Satu-Kapten	Penata	III/c	V.b	Pelaksana	
8	Letnan Satu	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	Pelaksana	
9	Letnan Dua	Penata Muda	III/a	-	Pelaksana	
10	Sersan Mayor- Pembantu Letnan Dua- Pembantu Letnan Satu	Pengatur Tingkat I	II/d	-	Pelaksana	
11	Sersan Kepala	Pengatur	II/c	-	Pelaksana	
12	Sersan Satu	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	Pelaksana	
13	Sersan Dua	Pengatur Muda	II/a	-	Pelaksana	
14	Kopral Dua- Kopral Satu- Kopral Kepala	Juru Tingkat I	I/d	-	Pelaksana	
15	Prajurit Kepala	Juru	I/c	-	Pelaksana	
16	Prajurit Satu	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	Pelaksana	
17	Prajurit Dua	Juru Muda	I/a	-	Pelaksana	

6

© Biro Ortala Setjen KDN, 2018



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id



# PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA POLRI DENGAN PANGKAT PNS



## PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA POLRI DENGAN PANGKAT PNS



NO	POLRI	PNS		ESELON	JABATAN
	PANGKAT	PANGKAT	GOL/RUANG		
1.	Komisaris Jenderal Polisi	Pembina Utama	IV/e	I.a	JPT Utama JPT Madya
2.	Inspektur Jenderal Polisi	Pembina Utama Madya	IV/d	I.a I.b	JPT Madya
3.	Brigadir Jenderal Polisi	Pembina Utama Madya	IV/c	II.a II.b	JPT Pratama
4.	Komisaris Besar Polisi	Pembina Tingkat I	IV/b	III.a III.b	Administrator
5.	Ajun Komisaris Besar Polisi	Penata Tingkat I	III/d	IV.a IV.b	Pengawas



BERPRESTASI DAN INOVATIF

6

© Biro Orjala Setjen KDN, 2018



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id



# PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA POLRI DENGAN PANGKAT PNS



*Lanjutan...*

NO	POLRI	PNS		ESELON	JABATAN
	PANGKAT	PANGKAT	GOL/ RUANG		
6.	AKP - Kompok	Penata Muda Tingkat I	III.d	IV.a	Pelaksana
7.	IPTU – AKP	Penata	III.c	V.b	Pelaksana
8.	IPTU	Penata Muda Tingkat I	III.b	-	Pelaksana
9.	IPDA	Penata Muda	III.a	-	Pelaksana
10.	Bripka – Aipda – Aiptu	Pengatur Tingkat I	II.d	-	Pelaksana
11.	Brigpol	Pengatur	II.c	-	Pelaksana
12.	Briptu	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	-	Pelaksana
13.	Bripda	Pengatur Muda	II.a	-	Pelaksana
14.	Abripda – Abriptu - Abrippol	Juru Tingkat I	I.d	-	Pelaksana
15.	Bharaka	Juru	I.c	-	Pelaksana
16.	Bharatu	Juru Muda Tingkat I	I.b	-	Pelaksana
17.	Bharada	Juru Muda	I.a	-	Pelaksana



BERPRESTASI DAN INOVATIF

7

© Biro Ortala Setjen KDN, 2018



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id



# PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI DENGAN PANGKAT PNS

NO	PNS	ESELON	TNI	POLRI	SIMBOL PNS
1	Pembina Utama (IV/e)	I	LETJEN TNI LAKSDYA TNI MARSDYA TNI	KOMJEN POL	Bintang Emas 3
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	I	MAYJEN TNI LAKSDA TNI MARSDA TNI	IRJEN POL	Bintang Emas 2
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	I – II	BRIGJEN TNI LAKSMA TNI MARSMA TNI	BRIGJEN POL	Bintang Emas 1
4	Pembina Tk. I (IV/b)	II – III	KOLONEL	KOMBES Pol	Melati Emas 3
5	Pembina (IV/a)	III – IV	LETKOL	AKBP	Melati Emas 2
6	Penata Tk. I (III/d)	III – IV	KAPTEN - MAYOR	AKP - KOMPOL	Melati Emas 1
7	Penata (III/c)	IV	LETTU - KAPTEN	IPTU - AKP	Balok 3 Emas

© Biro Ortala Setjen KDN, 2018



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



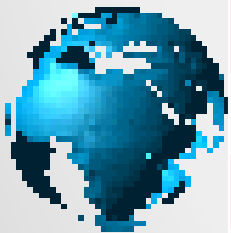
www.rb.kemendagri.go.id





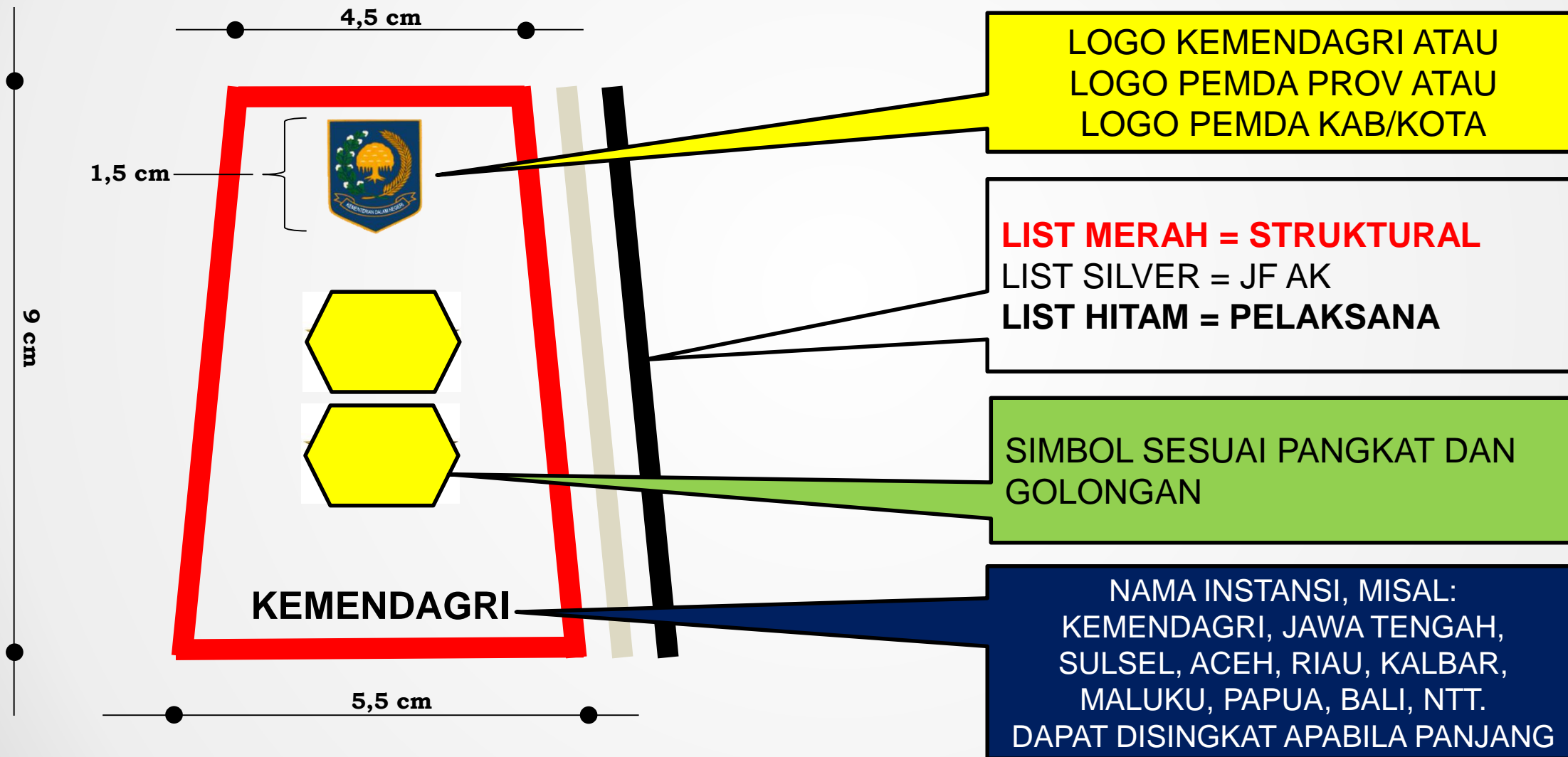
# PENYETARAAN PANGKAT ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI DENGAN PANGKAT PNS

NO	PNS	ESELON	TNI	POLRI	SIMBOL PNS
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	LETTU	IPTU	Balok 2 Emas
9	Penata Muda (III/a)	-	LETDA	IPDA	Balok 1 Emas
10	Pengatur Tk. I (II/d)	-	SERSAN MAYOR PEMBANTU LETDA PEMBANTU LETTU	BRIPKA AIPDA AIPTU	Balok 4 Silver
11	Pengatur (II/c)	-	SERSAN KEPALA	BRIGPOL	Balok 3 Silver
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	SERSAN SATU	BRIPTU	Balok 2 Silver
13	Pengatur Muda (II/a)	-	SERSAN DUA	BRIPDA	Balok 1 Silver
14	Juru Tk. I (I/d)	-	KOPRAL DUA, KOPRAL SATU, KOPRAL KEPALA	ABRIPDA, ABRIPTU, ABRIPPOL	Balok 4 Coklat
15	Juru (I/c)	-	PRAJURIT KEPALA	BHARAKA	Balok 3 Coklat
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	PRAJURIT SATU	BHARATU	Balok 2 Coklat
17	Juru Muda (I/a)	-	PRAJURIT DUA	BHARADA	Balok 1 Coklat





# FINALISASI TANDA PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA





# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



KEMENDAGRI

JURU MUDA (I/a)



KEMENDAGRI

JURU MUDA TK. I (I/b)



KEMENDAGRI

JURU (I/c)



KEMENDAGRI

JURU TK. I (I/d)

## Keterangan:

List pinggir berwarna hitam, Bagian tengah atas di lengkapi dengan lambang Instansi, Berwarna dasar khaki, Untuk Golongan I diberikan tanda **BALOK BERWARNA COKLAT**, Bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama OPD



# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



PENGATUR MUDA (II/a)



PENGATUR MUDA TK. I (II/b)



PENGATUR (II/c)



PENGATUR TK. I (II/d)

## Keterangan:

List pinggir berwarna hitam, Bagian tengah atas di lengkapi dengan lambang Instansi, Berwarna dasar khaki, Untuk Golongan II diberikan tanda **BALOK BERWARNA ABU-ABU / SILVER**, Bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama OPD



# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



PENATA MUDA (III/a)



PENATA MUDA TK. I (III/b)



PENATA (III/c)

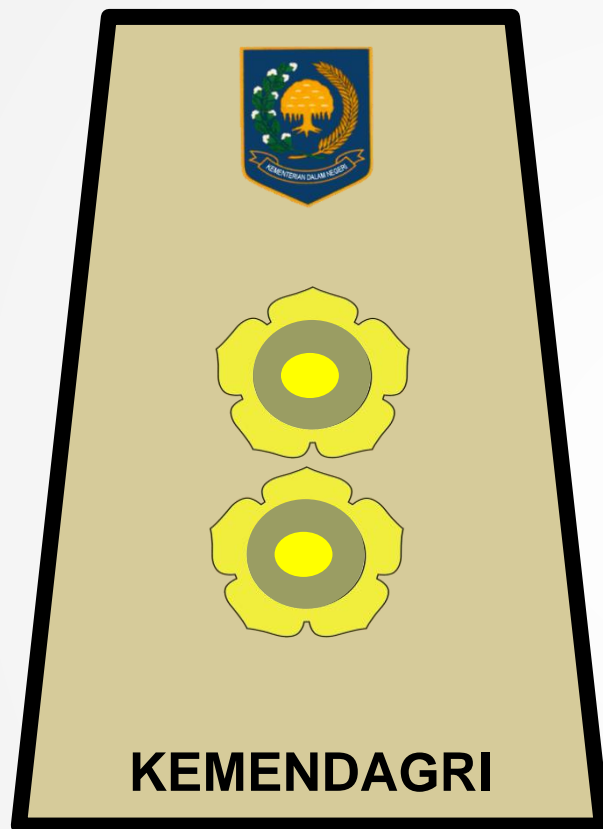


PENATA TK. I (III/d)

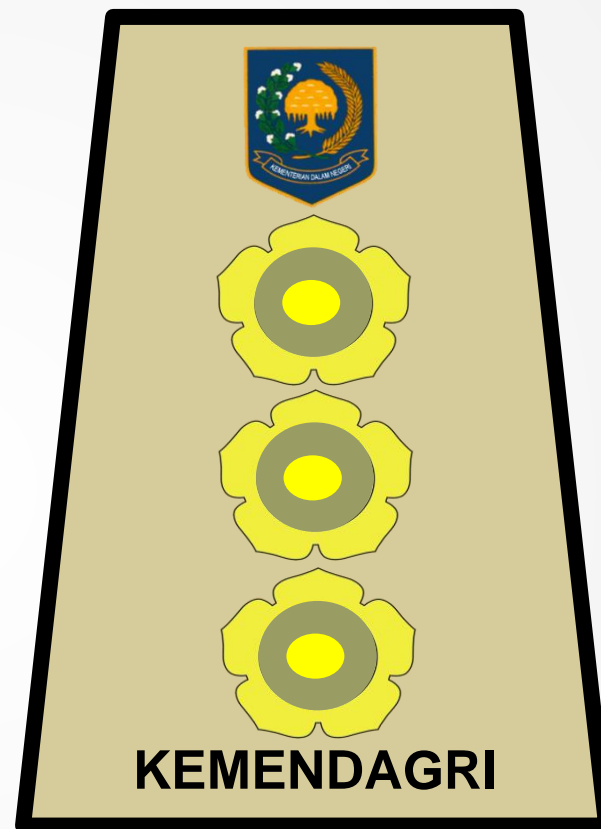
**Keterangan:**  
List pinggir berwarna hitam, Bagian tengah atas di lengkapi dengan lambang Instansi, Berwarna dasar khaki, Untuk Golongan III/a, III/b dan III/c diberikan tanda **BALOK BERWARNA KUNING EMAS**, Untuk Golongan III/d diberikan tanda **BUNGA BERWARNA KUNING EMAS**, Bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama OPD



# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



PEMBINA (IV/a)



PEMBINA TK. I (IV/b)

## Keterangan:

List pinggir berwarna hitam, Bagian tengah atas di lengkapi dengan lambang Instansi, Berwarna dasar khaki, Untuk Golongan Iva dan IVb diberikan tanda **BUNGA BERWARNA KUNING EMAS**, Bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama OPD



# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)



PEMBINA UTAMA (IV/e)

## Keterangan:

List pinggir berwarna hitam, Bagian tengah atas di lengkapi dengan lambang Instansi, Berwarna dasar khaki, Untuk Golongan IV.c, IV.d dan IV.e diberikan tanda **BINTANG BERWARNA KUNING EMAS**, Bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama OPD



# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



**KEMENDAGRI**



**JAWA TENGAH**



**SEMARANG**



**JAWA TIMUR**

**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

## **CONTOH:**

Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Pembina Utama Muda (IV/c) yang Menjabat sebagai Eselon II di Kemendagri;  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Pembina Utama Muda (IV/c) yang Menjabat sebagai Eselon II di Provinsi Jawa Tengah;  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Pembina Utama Muda (IV/c) yang Menjabat sebagai Eselon II di Kota Semarang;  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Pembina Utama Muda (IV/c) yang Menjabat sebagai JFT P2UPD atau JFT Lain.





# PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA



**KEMENDAGRI**

**PENATA (III/c)**



**KEMENDAGRI**

**PENATA (III/c)**



**KEMENDAGRI**

**PENATA TK. I (III/d)**



**KEMENDAGRI**

**PENATA TK. I (III/d)**

**CONTOH:**  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Penata (III/c) yang Menjabat sebagai Pejabat Eselon IV;  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Penata (III/c) yang Menjabat sebagai Pejabat Pelaksana;  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Penata Tk. I (III/d) yang Menjabat sebagai Pejabat Eselon III;  
Tanda Pangkat untuk PNS dengan Panggol Penata Tk. I (III/d) yang Menjabat sebagai JFT P2UPD atau JFT Lain;



# IRISAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

LEVEL PEMERINTAHAN PUSAT

**PRESIDEN**

34 MENTERI DAN 31 KEPALA LPNK

Korbinwas Pemda

IRISAN TUSI KEMENDAGRI DAN K/L

K/L

KEMENDAGRI

Koordinasi

**MENDAGRI**

LEVEL PEMERINTAHAN DAERAH

Binwas Teknis

Binwas Umum

34 PROVINSI

34 GWPP

Binwas Umum dan Teknis

514 KABUPATEN/KOTA

1. Kemenpanrb, Kominfo, Kemenkumham, dLL;
2. BPIP dan Kemenkumham, dLL;
3. BNPB dan BNPP;
4. Kemenpanrb, Kemenkumham, BKN, KASN;
5. Bappenas;
6. Kemendes;
7. Kemenkeu;
8. BKKBN;
9. BPKP;
10. LIPI dan Kemenristek Dikti;
11. LAN;

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Ditjen Otonomi Daerah;
5. Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
6. Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
7. Ditjen Bina Keuangan Daerah;
8. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

© Biro Ortala Setjen KDN, 2018



@kemendagrib



KemendagriRb



@kemendagrib



www.rb.kemendagri.go.id



# KESIMPULAN

1. **SEDANG DILAKUKAN REVISI TERHADAP PERMENDAGRI TENTANG PAKAIAN DINAS PNS DILINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA;**
2. **PENGGUNAAN TANDA PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DISERAGAMKAN BERDASARKAN PERUBAHAN PERMENDAGRI TTG PAKAIAN DINAS PNS;**
3. **BAGI PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN PENGGUNAAN TANDA JABATAN (JENGKOL), SELAIN TANDA JABATAN CAMAT, LURAH, POL PP DAN PENGATURAN TEKNIS INSTANSI VERTIKAL, **WAJIB DI HAPUS**;**
4. **TANDA PANGKAT PNS BERTUJUAN UNTUK PENYERAGAMAN DAN MENINGKATKAN DISIPLIN SERTA SEBAGAI TANDA BAHWA PNS MERUPAKAN PELAYAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN FUNGSI, KEWENANGAN DAN JABATANNYA.**



**CTO - SEKRETARIAT RB KEMENDAGRI**

**BAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI**

**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat**

**HP: 0812 2040 8866 - e-mail: [RB-Kemendagri@gmail.com](mailto:RB-Kemendagri@gmail.com)**

**Website: <http://www.rb.kemendagri.go.id>**



**BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA, 2018**